

TAJUK RENCANA

Pinjaman Online Ilegal

KONDISI perekonomian yang sedang terdampak pandemi Covid-19 mendorong banyak warga membutuhkan 'dana segar' untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pinjaman online dirasa merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang. Seperti yang sedang viral beberapa hari terakhir ini, ada sejumlah warga yang terjebak pinjaman online. Bahkan banyak juga yang terjebak 'arisan bodong'.

Dalam kondisi seperti saat ini, ada juga warga yang mencari dana segar lewat pinjaman online, hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Itu dilakukan karena proses pinjaman online lebih mudah dan lebih cepat. Namun kebanyakan dari mereka tidak mempertimbangkan risiko pinjaman online, yang juga sering disebut investasi bodong.

Karena banyaknya kasus tersebut, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI OJK) kembali menutup investasi bodong dan memblokir sejumlah fintech peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online ilegal. SWI juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda tawaran pinjaman online dan investasi mata uang virtual atau uang kripto yang saat ini sedang digandrungi sebagian masyarakat.

Menurut Ketua SWI, Tongam Luban Tobing, masyarakat harus selalu mewaspadai berbagai program terkait dengan pinjaman dan

investasi, yang tidak jelas legalitasnya. Selain itu, sebelum melakukan transaksi pinjaman dan investasi, masyarakat diminta mempelajari literasi mengenai produk-produk uang dan investasi.

Dalam kondisi serba sulit, tentunya sangat lumrah kalau masyarakat mudah tergiur mendapatkan uang cepat dan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat. Masyarakat berperilaku seperti itu cenderung mengabaikan logika dan nalar yang bening.

Terkait dengan masalah pinjaman dan investasi, kalau dicermati dalam beberapa tahun ini ada dua kecenderungan lapisan masyarakat tanpa pikir panjang. Pertama, berkaitan dengan upaya mencari pinjaman dengan cara mudah dan cepat. Kedua, menanam investasi yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda.

Melihat kasus-kasus yang bermunculan selama ini, tentu harus ada dukungan terhadap OJK yang telah memblokir 3.193 pinjaman online ilegal. Juga harus diakui, bahwa tujuan pinjaman online sebenarnya adalah membantu dan memudahkan masyarakat dalam urusan pinjam uang.

Kenyataan selama ini juga menunjukkan, banyak peminjam yang abai terhadap tanggungjawab dan risiko yang harus ditanggung sebagai peminjam. Lebih tragis lagi, banyak yang terjebak di pinjaman online ilegal. □

Haji, Hoaks, dan Panggilan Tuhan

H Brama Aji Putra

Dalam catatan kami, paling tidak sejak medio November 2020, Kementerian Agama dan DPR RI terus membahas penyelenggaraan haji di masa pandemi. Rapat kian intensif dilakukan Desember 2020 dan Januari 2021. Tepat akhir Desember 2020, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan KMA 913/2020 tentang Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Haji 1442 H/2021 M. Diplomasi haji juga dilakukan Menag Yaqut pada 18



ngan Kemenkes, Kemenlu dan WHO Indonesia. Bahkan akhir April 2021, Kemenag menggelar *bahtsul masail* penyelenggaraan haji di masa pandemi dengan menghadirkan ahli fiqh Ormas Islam, akademisi dan praktisi haji.

Terbaik

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan manajemen penyelenggaraan haji terbaik di dunia. Hal itu tak lepas dari perbaikan terus-menerus yang dilakukan di seluruh aspek mulai dari bimbingan manasik hingga pengadaan layanan selama di Madinah dan Makkah. Baik dalam sisi transportasi, catering maupun akomodasi tempat tinggal. Bahkan Indonesia memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah yang diamankan kepada petugas haji khususnya tenaga Perlindungan Jemaah yang mayoritas anggota TNI-Polri.

Banyak di antara negara-negara lain yang belajar kepada Indonesia. Saat penulis menjadi anggota Media Center Haji (MCH) tahun 1439 H / 2018 M lalu, tim misi haji dari India, Pakistan dan Bangladesh bertandang ke kantor Daker Makkah dan Madinah untuk *ngansu kawruh* manajemen perhajian Indonesia.

Haji adalah panggilan-Nya. kewajiban kita sebagai jemaah untuk mendaftar. Setelah itu biarlah Tuhan yang akan memanggil kita dengan skenario terbaik dari-Nya. □

H Brama Aji Putra SKomI,
Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Sekretaris PW Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia DIY

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Bijak Bermedia Sosial

ERA digital ditandai perubahan perilaku sosial dari tatap muka menjadi online, serta mengubah tatanan aktivitas ke dalam jaringan. Bahkan di dunia pendidikan pun pembelajaran dilaksanakan jarak jauh (PJJ), sehingga seluruh stakeholder mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar hal baru terus menerus, termasuk penggunaan aplikasi melalui android.

Ada rumor kalau dulu 'mulutmu adalah harimaumu', era abad 21 ini berubah menjadi 'jempolmu adalah harimaumu'. Menandakan perlu kehati-hatian dalam bermedia sosial. Seringkali muncul ujaran kebencian, berita hoax, tulisan maupun gambar yang tidak beretika dan tidak seharusnya diposting.

Adanya media sosial tidak bisa dibendung dan disensor, filter yang tepat sebagai sensor adalah diri sendiri, tidak hanyut sekadar ikut-ikutan, serta bisa membedakan baik buruk tulisan apakah menimbulkan SARA, menyinggung individu maupun kelompok, membuat perpecahan antargolongan. Bagaimana menyikapinya?

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi terkini, update memang diperlukan. Tak heran jika orang berlomba-lomba untuk memperolehnya dan meneruskannya atau share antargrup maupun WA pribadi. Kecepatan transfer informasi seolah menjadi kompetisi. Semakin cepat mendapat info baru semakin cepat pula berita di genggam. Hanya saja setiap berita yang diterima seharusnya dicerna dulu, dipahami. Apabila tidak menimbulkan perpecahan, hoax maupun kebencian baru bisa diteruskan ke grup lainnya sela-

ma kontennya memberikan motivasi, kebaikan, solusi sebuah permasalahan, dan hiburan yang tidak mengandung SARA.

Apabila komentar harus yang menyajikannya atau yang bisa menginspirasi orang lain, memberikan contoh kebaikan. Jika ada joke, lelucon, atau guyonan yang mengajak untuk berbuat baik atau mendidik. Apalagi konten tentang video, animasi, musik apapun juga tidak mengandung provokasi.

Andai menerima berita yang tidak menyenangkan, gambar dan video yang tidak sesuai dengan norma susila, ada komen-komen yang kurang menyenangkan maupun berita setelah dilakukan cross check ternyata tidak benar, maka dihapus saja tanpa harus memberikan komen, atau WA pribadi dengan tulisan yang santun.

Menjadi pelopor yang bijak bermedia sosial, serta mengajak dan membuat tulisan, gambar, video yang bisa menginspirasi orang banyak untuk berbuat kebaikan, melakukan aksi inovasi, dan setiap individu bergegas untuk mengisi konten-konten positif dalam bermedia sosial, yakin bahwa antarindividu saling memiliki prasangka baik dan bersinergi, maka akan menjadikan pola komunikasi, baik tulisan di media sosial maupun lisan akan berlangsung dan terjaga dengan baik.

Marilah android yang ada di genggam dimanfaatkan untuk mengisi tulisan, gambar, video kreatif serta mengingatkan, dan mengajak kebaikan. □

Eko Mulyadi MSI, Guru Fisika
SMKN 3 Yogya.

MEMBACA Tajuk Rencana SKH Kedaulatan Rakyat, Jumat (11/6) semalam membuka mata kita bahwa hoaks atau kabar bohong telah mencapai taraf mengkhawatirkan. Apa pasal? Pembatalan pemberangkatan haji yang sebenarnya murni karena sampai detik ini pihak Saudi belum mengumumkan penyelenggaraan haji. Arab Saudi juga belum memberikan undangan haji kepada negara manapun di dunia. Namun pemberitaannya sudah 'digoreng' menjadi isu-isu yang rentan menyesatkan publik.

Paling tidak ada 4 (empat) isu hoaks seputar batalnya haji tahun ini. Seperti yang ditulis KR, pertama, hoaks yang menyebut Indonesia masih punya utang akomodasi di Saud. Kedua, vaksin untuk jemaah haji Indonesia belum diverifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); Ketiga, Indonesia tidak maksimal dalam upaya membebankan jemaah haji dan keempat, pasca-Indonesia memutuskan tidak membebankan, dikabarkan Malaysia mendapat tambahan kuota 10 ribu.

Berita Resmi

Hoaks bahwa negara kita masih punya utang akomodasi di Saudi tentu tak berdasar sama sekali. Seluruh kontrak pembayaran akomodasi jemaah telah dilunasi pada tahun penyelenggaraan itu juga.

Tentu berbagai perusahaan hotel, catering dan transportasi Saudi tak akan memberikan layanannya jika negara kita memang masih punya utang pada tahun berjalan. Bagaimana dengan vaksin Sinovac? Seperti berita resmi yang telah beredar, per 1 Juni 2021, WHO telah memberikan izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Listing* (EUL) kepada beberapa vaksin termasuk Sinovac yang telah disuntikkan kepada sebagian besar penerima vaksin Indonesia, pula kepada calon jemaah haji kita.

Lalu disebutkan pula Indonesia tidak maksimal dalam upaya membebankan jemaah haji tahun ini.

Mengulik Batas Usia PPDB

FX Triyas Hadi Prihantoro

2015, karena Pemerintah menginginkan semua anak wajib sekolah dan Pemerintah wajib membiayai dan menyiapkan segala fasilitasnya.

Guna merealisasikan wajib belajar 12 tahun Pemerintah siap melaksanakan konsekuensi yang timbul. Maka saat syarat usia direalisasikan, wajib untuk sekolah negeri sebagai bentuk tanggung jawab. Permasalahan usia menjadi prioritas dan hambatan bagi peserta didik yang belum cukup umur dimungkinkan karena sosialisasi yang belum merata dan menyeluruh. Butuh evaluasi komprehensif dari pemerintah pusat dan daerah agar persoalan ini tidak semakin meluas dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Mendesak untuk diterima dan belum cukup umur berarti sudah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum, semua saja wajib mentaati aturan yang telah diundangkan. Bila berani melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas, aturannya jelas. Persyaratan usia secara tegas harus dibuktikan dengan: a. akta kelahiran; atau b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik (pasal 7 ayat 1).

Pada prinsipnya persoalan batasan usia dibutuhkan kete-

PROSES penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini kembali melahirkan polemik. Permasalahan masih berkisar antara prestasi, zonasi dan usia, boleh diterima. Muncul karena dalam proses seleksi calon siswa yang diutamakan adalah usia, bukan berdasarkan zonasi maupun prestasi.

Berdasarkan Permendikbud No 1 tahun 2021 tentang PPDB, penerimaan berdasarkan usia bahwa peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia (a). 7 (tujuh) tahun atau (b). paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (pasal 4 ayat 1). Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat (pasal 5) dan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat (pasal 6 ayat 1).

Beberapa orang tua murid yang mempersoalkan anaknya yang tidak diterima di sekolah tujuan karena memang usianya belum memenuhi syarat. Bagimanapun pemerintah mempunyai kebijaksanaan sesuai tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu pula sesuai program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun guna meningkatkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Wajib belajar 12 tahun sendiri sudah dimulai sejak bulan Juni

gasan sebagai regulasi terhadap keadaan dalam PPDB itu sendiri. Dalam PPDB semua sekolah mempunyai visi dan misi yang sama termasuk keprofesionalan pendidik dan tenaga pendidikan dalam pengelolaan. Semua sekolah layak mendapatkan keadilan dan kesempatan dalam melaksanakan KBM. Maka saat muncul desakan penambahan kuota dengan konsekuensi penambahan kelas untuk mengatasi polemik bukan merupakan jalan ke luar. Karena berimplikasi kepada persoalan baru dan menjadi masalah bagi pengambil kebijaksanaan.

Pelaksanaan PPDB memang butuh kepatuhan dan kedisiplinan bersama. □

FX Triyas Hadi Prihantoro,
Pengajar SMP PL Domenico Savio Semarang

Pojok KR

Banyak hajatan abai protokol kesehatan, kasus positif-19 di DIY pecah rekor.

- Kok pecah terus?

Satgas Waspada Investasi OJK memblokir 3.193 pinjaman online ilegal dan investasi bodong.

-- Ilegal dan bodong.

Emak-emak peserta arisan Hoki melakukan demo.

-- Arisan lagi.

Beraks

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkr@yahoo.com, iklandkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%